

**PROBLEMATIKA HUKUM PROSES PERMOHONAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
TETAP OLEH KREDITOR**

SKRIPSI



Oleh:

LIEM TONY DWI SOELISTYO
NIM: 1311800202

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

**PROBLEMATIKA HUKUM PROSES PERMOHONAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
TETAP OLEH KREDITOR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh:

LIEM TONY DWI SOELISTYO

NIM: 1311800202

Dosen Pembimbing:

Dipo Wahjocono H., S.H., M.Hum.

NPP/NIP: 20310880149

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

**PROBLEMATIKA HUKUM PROSES PERMOHONAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
TETAP OLEH KREDITOR**

Oleh:

LIEM TONY DWI SOELISTYO
NIM: 1311800202

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 12 Januari 2022

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 034/SK/FH/I/2022
Tanggal: 7 Januari 2022

TIM PENGUJI

Ketua : Sugeng Hadi Purnomo, S.H., M.H.
NPP: 20310880148

Sekretaris : Muh Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.
NPP: 196606181991031002

Anggota : Dr. Rosalinda Elgina L., S.H., M.Kn.
NPP: 20310860066

Mengetahui:

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,



Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
NPP: 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LIEM TONY DWI SOELISTYO
NIM : 1311800202
Program : Sarjana Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di MALEO LAW JOURNAL dalam Volume 6 Issue 1, April 2022 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu:

PROBLEMATIKA HUKUM PROSES PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TETAP OLEH KREDITOR

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 14 Januari 2022
Yang membuat pernyataan,



LIEM TONY DWI SOELISTYO

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LIEM TONY DWI SOELISTYO
NIM : 1311 800202
Program : Sarjana Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di MALEO LAW JOURNAL dalam Volume 6 Issue 1, April 2022 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu:

PROBLEMATIKA HUKUM PROSES PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TETAP OLEH KREDITOR

Benar bebas dari publikasi ganda dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 14 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



LIEM TONY DWI SOELISTYO

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LIEM TONY DWI SOELISTYO
NIM : 1311800202
Program : Sarjana Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul:

PROBLEMATIKA HUKUM PROSES PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TETAP OLEH KREDITOR

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain.

Sepengetahuan saya di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar bacaan.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia SKRIPSI ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari siapapun

Surabaya, 14 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



LIEM TONY DWI SOELISTYO



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA A

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LIEM.TONY.DWI.SOELISTYO.....
NBI/ NPM : 1311800202.....
Fakultas : HUKUM.....
Program Studi : ILMU.HUKUM.....
Jenis Karya : Skripsi/ Tesis/ Disertasi/ Laporan Penelitian/Praktek*

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul:

.....
**PROBLEMATIKA HUKUM PROSES PERMOHONAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
TETAP OLEH KREDITOR**
.....

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty - Free Right)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum

Dibuat di : Surabaya.....
Pada tanggal : 18 Januari 2022.....

Yang Menyatakan,



(..... 2E0B5AJX020006165)

Liem Tony Dwi . S

*Coret yang tidak perlu

*I did it because I can, I can because I want to, I want to because they said I
couldn't.....*

Skripsi ini kupersembahkan kepada: Keluargaku tercinta, yang selalu memberikan doa dan dukungan serta mereka semua yang menyayangi saya. Semoga kita selalu sehat dan berbahagia dalam limpahan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul *“PROBLEMATIKA HUKUM PROSES PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TETAP OLEH KREDITOR”*. Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum strata satu di Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal tersebut kiranya dapat dimaklumi karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki.

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam memperluas wawasan pengetahuan terkait masalah Kepailitan dan PKPU serta dapat dipergunakan sebaik mungkin untuk kajian bagi kalangan akademisi, penegak hukum, dan masyarakat. Dan tidak melupakan jasa para pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, tak henti-hentinya ucapan terima kasih kepada:

- Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., C.M.A., C.P.A., selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar bersedia meluangkan waktu dan memberikan segala bantuan, bimbingan, koreksi dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini dalam mata kuliah Metode Penelitian Hukum.
- Wiwik Afifah, S.Psi., S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Dipo Wahjoeono H., S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar bersedia meluangkan waktu dan memberikan segala bantuan, bimbingan, koreksi dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
- Sugeng Hadi Purnomo, S.H., M.H., Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H. dan Dr. Rosalinda Elsina Latumahina, S.H., M.Kn., selaku Tim Penguji yang telah bersedia memberikan segala bantuan, masukan dan koreksi dalam penyusunan skripsi ini.
- Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta staf Tata Usaha dan Tenaga Kependidikan yang telah memberikan ilmunya dan membantu saya selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Rekan-rekan Sarjana Ilmu Hukum Angkatan Tahun 2018 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Terima kasih untuk kebersamaan dan semangatnya.

- Liem Meyliana, yang tak henti-hentinya mendoakan dan memberikan dukungan kepada saya.
- Yasin Nur Alamsyah Hidayat Ali Samiaji, rekan yang selalu memotivasi saya serta membantu saya dalam penulisan skripsi ini.
- Johanes Dipa Widjaja, S.H., S.Psi., M.H., C.L.A., sahabat yang menjadi panutan bagi saya dan selalu memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini.
- Rekan-rekan pada Kantor Hukum “Johanes Dipa Widjaja & Partners”, yang telah memberi dukungan untuk penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis dengan penuh kesadaran menyatakan bahwa penulisan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan masih belum sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun akan sangat diharapkan guna perbaikan di masa mendatang.

Surabaya, Januari 2022

LIEM TONY D. S

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak debitor maupun kreditor dalam proses pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetap, sebagai alternatif penyelesaian perkara utang-piutang dalam kegiatan bisnis bagi perusahaan/debitor yang mengalami kesulitan keuangan dalam membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Hal tersebut dengan maksud untuk menghindari dan mencegah kondisi kepailitan dengan memberikan kesempatan bagi perusahaan/debitor untuk dapat melanjutkan kegiatan usahanya dengan cara menunda pembayaran utang, restrukturisasi dan reorganisasi perusahaan, dll., guna menghasilkan keuntungan, meningkatkan kinerja serta pendapatan dan arus kas (*cash flow*). Dengan demikian peluang dan harapan untuk dapat membayar utang-utangnya akan semakin terbuka, mengingat pencegahan kepailitan dapat menguntungkan banyak pihak, termasuk karyawan, rantai bisnis (pemasok, konsumen), pemegang saham, kreditor yang piutangnya akan dilunasi, serta masyarakat dan negara. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan kajian hukum positif, pendekatan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer, pendekatan konsep dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum dan pendekatan perbandingan terkait kepailitan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian PKPU tetap sebagai upaya hukum untuk menghindari dan mencegah kepailitan, harus dapat menjadi alternatif jalan keluar dari kesulitan keuangan dan merupakan penerapan prinsip kelangsungan usaha. Debitor yang mengalami kesulitan keuangan atau mengalami kesulitan likuiditas untuk memenuhi kewajibannya membayar utang seharusnya tidak langsung dipailitkan dan dilikuidasi, apalagi saat ini di tengah masa pandemi Covid-19 sektor ekonomi sungguh sangat terdampak. Hukum kepailitan pada masa mendatang perlu dilengkapi dengan adanya insolvensi tes agar permohonan pernyataan pailit menjadi lebih objektif dan melindungi kepentingan debitor. Selain itu perlu adanya batasan minimal jumlah utang debitor sebagai syarat permohonan pailit oleh kreditor, hal tersebut untuk menghindari debitor yang nilai asetnya lebih besar dibandingkan dengan utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan.

Kata kunci: kreditor, debitor, utang, pkpu

ABSTRACT

The purposes of this research are to provide legal certainty and protection for debtors and creditors in the process of granting a permanent Suspension of Debt Payment Obligation (PKPU), as an alternative to settlement of debt cases in business activities for companies/debtors who are experiencing financial difficulties in paying their debts which are due dates and collectible. This is intended to avoid and prevent bankruptcy conditions by providing opportunities for companies/debtors to be able to continue their business activities by delaying debt payments, restructuring and reorganizing companies, etc., in order to generate profits, improve performance, income and cash flow. Thus, the opportunity and hope to be able to pay its debts will be more open, considering that bankruptcy prevention can benefit many parties, including employees, the business chain, suppliers, consumers, shareholders, creditors whose debt will be repaid, as well as the community and the state. Using normative juridical research methods with positive legal studies, statutory approaches as primary legal materials, conceptual approaches by referring to legal principles and comparative approaches related to bankruptcy in Indonesia. The results of the study indicate that the granting of PKPU remains as a legal effort to avoid and prevent bankruptcy, must be an alternative way out of financial difficulties and as an application of the principle of business continuity. Debtors who are experiencing financial difficulties or experiencing liquidity difficulties to fulfill their debt obligations should not be declared bankrupt and liquidated immediately, especially at this time in the midst of the Covid-19 pandemic, the economic sector is really affected. Bankruptcy law in the future needs to be complemented by a test of insolvency so that the petition for a bankruptcy statement becomes more objective and protects the interests of the debtors. In addition, it is necessary to have a minimum limit on the amount of debtor's debt as a condition of bankruptcy petition by creditors, this is to avoid debtors whose asset values are greater than their debts being declared bankrupt by the court.

Keywords: *creditor, debtor, debts, suspension of payment*

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	vi
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vii
PERNYATAAN PERSETUJUAN KARYA ILMIAH.....	viii
<i>MOTTO</i>	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Metode penelitian	9
1.5.1. Jenis Penelitian	9
1.5.2. Metode Pendekatan	9
1.5.3. Sumber Bahan Dan Jenis Bahan Hukum.....	10
1.5.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	10
1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum	10
1.6. Pertanggungjawaban Sistematis.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1. Tinjauan Umum Kepailitan	13
2.1.1. Sejarah Kepailitan Indonesia.....	13
2.1.2. Pengertian Kepailitan	14
2.1.3. Persyaratan Debitor Dapat Dinyatakan pailit	16
2.1.4. Pihak Yang Dapat Mengajukan Permohonan Pailit	18
2.2. Tinjauan Umum PKPU.....	22
2.2.1. Pengertian PKPU.....	22
2.2.2. PKPU sementara.....	24
2.2.3. PKPU tetap.....	25
2.2.4. Perdamaian Dalam PKPU	26

2.2.5. Berakhirnya PKPU	27
2.3. Tinjauan Umum Pengadilan Niaga	29
BAB III PEMBAHASAN.....	31
3.1. Prosedur PKPU sementara menjadi PKPU tetap menurut ketentuan UUK- PKPU	31
3.2. Akibat hukum jika kuorum kreditor tidak terpenuhi	40
BAB IV PENUTUP	53
4.1. Kesimpulan.....	53
4.2. Saran.....	53
DAFTAR BACAAN	55